



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TABALONG**





BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2025



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025
TANGGAL 1 Juli 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4.	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28.	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta
33.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik dari sisi kebijakan, arah pembangunan, maupun ketersediaan anggaran. Dokumen ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas serta fungsi pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur.

Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Melalui dokumen ini diharapkan terdapat keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas aparatur sipil negara di Kabupaten Tabalong. Akhirnya dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini kepada semua pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan kami ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita kerjakan.

Tanjung, 1 Juli 2025

Kepala



Dr. Drs. H. Erwan, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660921 198703 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7
2.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten	17
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	17
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024 Kabupaten Tabalong	9
Tabel 2.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 Kabupaten Tabalong	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk satu tahun anggaran.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong perlu disesuaikan dengan berbagai dinamika yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan daerah, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan, sasaran, serta alokasi pendanaan agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Perubahan Renja ini disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Perubahan dilakukan karena adanya beberapa faktor strategis, antara lain:

1. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi kinerja dan capaian indikator program serta kegiatan tahun sebelumnya;
2. Penyesuaian kebijakan nasional dan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur;
3. Perubahan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
4. Penyesuaian pagu indikatif sebagai dampak dari rasionalisasi dan refocusing anggaran.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan kapasitas aparatur, BKPSDM Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Bupati Tabalong, yaitu “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”. Visi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, pembangunan yang berkeadilan, serta masyarakat yang religius dan berdaya saing.

Dengan demikian, Perubahan Renja Tahun 2025 bukan sekadar revisi administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sumber daya aparatur tetap adaptif, sinergis, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung terwujudnya Kabupaten Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan.

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong 2025 merupakan Renja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B-77/BAPPERIDA/000.7/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan kondisi, kebijakan, serta kebutuhan aktual pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Perubahan ini bertujuan agar dokumen Renja tetap relevan, konsisten, dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan adanya Perubahan Renja, diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tabalong dapat lebih terarah dan selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, serta mendukung pencapaian visi “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”.

Selain itu, penyusunan Perubahan Renja ini juga dimaksudkan sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana secara efisien, akuntabel, dan memberikan hasil nyata bagi peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan BKPSDM dengan perubahan prioritas pembangunan daerah serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar capaian sasaran kinerja dapat diwujudkan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran;
3. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur;
4. Menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan daerah, yaitu Renstra, RKPD Perubahan, dan APBD Perubahan Tahun 2025;
5. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kinerja, agar penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
6. Mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tabalong SMaRT, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Dengan demikian, penyusunan **Perubahan Renja Tahun 2025** menjadi instrumen strategis bagi BKPSDM Kabupaten Tabalong dalam menata pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap konsisten dengan arah pembangunan daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tabalong.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja merupakan penyesuaian terhadap Rencana Kerja awal yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, serta perubahan kebijakan dan pagu anggaran daerah.

Sistematika penulisan **Perubahan Renja Tahun 2025** disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2025, termasuk capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut perbaikan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian perubahan terhadap rencana kerja yang mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan umum serta harapan terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 agar dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan visi **“Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”**.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SK PD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis perangkat daerah.

Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025, khususnya dalam menetapkan kembali target dan kebutuhan pendanaan program, kegiatan, serta subkegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Rekapitulasi hasil evaluasi tersebut disajikan dalam Tabel T-C.29, yang memuat keterkaitan antara capaian Renstra, realisasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, serta target dan realisasi kinerja program/kegiatan Tahun 2025 hingga Triwulan I1.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Kinerja program dan kegiatan tahun 2024 sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian di atas 90% baik dari sisi output kegiatan maupun outcome program. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih di bawah target karena penyesuaian jadwal pelaksanaan dan refocusing anggaran.
2. Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019–2024 secara kumulatif berada dalam kategori baik, dengan rata-rata tingkat capaian antara 85–100% terhadap target Renstra.
3. Pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga Triwulan II menunjukkan progres positif, dengan rata-rata tingkat realisasi fisik mencapai sekitar 70–80% dan realisasi keuangan sekitar 60–70% dari pagu anggaran.
4. Kegiatan yang bersifat pengembangan kompetensi aparatur dan penguatan sistem informasi kepegawaian menjadi prioritas yang terus ditingkatkan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 agar mendukung arah

pembangunan sumber daya aparatur menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Dengan demikian, hasil evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja BKPSDM Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap target, indikator, dan kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2025.:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
Kabupaten Tabalong

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025-2026	
									Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)= (10/4)
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%		100%	78,82 %		100%	78,82%	100
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	38%	38%	100%	38%	100%
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	40%	5 Laporan	2 Laporan	100%
5	03	01	2.01	08	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1 Dokumen	Sub kegiatan baru ada di tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5	03	01	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	73 data	Sub kegiatan baru ada di tahun 2025	73 data	-	-	73 data	-	100%
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	100%	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	100%
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	12 Laporan	3 Laporan	100%
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	0%	0%		0%	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket	40 Paket	0	0%	40 paket	0%	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	0	0%	40 orang	0%	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	100%	100%	30%	30%	100%	30%	100%
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	103 buah	2 Paket	0	0%	2 Paket	0	100%
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1162 unit	15 Paket	4 Paket	24%	15 Paket	4 Paket	100%
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Sub kegiatan baru ada di tahun 2025	1 Paket	0	0%	1 Paket	0	100%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	37599 lembar	20 Paket	4 Paket	20%	4 Paket	4 Paket	100%
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1163 Dokumen	1162 eksemplar	1163 Dokumen	290 Dokumen	25%	1163 Dokumen	290 Dokumen	100%
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	100 laporan	200 Laporan	24 Laporan	12%	100 Laporan	24 Laporan	100%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	210 buah	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	0 Laporan	100%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	156 tagihan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	18 unit	16 Unit	5 Unit	31%	16 Unit	5 Unit	100%
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	135 buah	55 Unit	17 Unit	25%	65 Unit	17 Unit	100%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%

5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)	100%	100%	92	92	90%	92	92	100%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (nilai)	100%	91	91	90,74	90%	92	90,74	100%
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	0 dokumen	100%
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	0 dokumen	100%
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100%
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 Lembaga	1 lembaga	100%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
1	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Sub kegiatan baru ada di tahun 2025	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	0 Laporan	100%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Layanan Mutasi dan Rotasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	5 Dokumen	25%	15 Dokumen	5 Dokumen	100%

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 Dokumen	361 dokumen	450 Dokumen	112 dokumen	25%	600 Dokumen	112 dokumen	100%
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	1 dokumen	14%	4 Dokumen	1 dokumen	100%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	56 Orang	55 orang	56 Orang	19 Orang	34%	56 Orang	19 Orang	100%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	68 orang	65 Orang	11 orang	17%	65 Orang	11 orang	100%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	4650 dokumen	5200 Dokumen	3566 Dokumen	68%	5200 Dokumen	3566 Dokumen	100%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	130 orang	200 Orang	0 Orang	0%	200 Orang	0 Orang	100%
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	4.650 orang	200 Orang	130 Orang	65%	5 Orang	130 Orang	100%
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	708 dokumen	5 Laporan	1 Laporan	20%	5 Laporan	1 Laporan	100%
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	11 dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	60%	5 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	04													
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai (Persen)	100%	100%	100%	25%	25%	100%	25%	100%
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Lulus Diklat	100%	100%	100%	9%	9%	100%	9%	100%
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	499 orang	100 Orang	9 Orang	9%	100 Orang	9 Orang	100%

					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat	100%	100%	100%	25%	25%	100%	25%	100%
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	30%	3 Laporan	1 Laporan	100%
5	04	02	2.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri	100%	100%	100%	25%	25%	100%	25%	100%
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	12 orang	117 orang	12 orang	3 orang	40 orang	12 orang	3 orang	12 orang

2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tabalong, antara lain:

2.2.1 Permasalahan yang Dihadapi

1. Realisasi Keuangan Masih Rendah pada Awal Tahun
Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan proses administrasi dan pelaksanaan karena penyesuaian dokumen DPA serta perubahan jadwal pencairan anggaran.
2. Penyesuaian Rencana Kegiatan dengan Pagu Anggaran
Adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran pada awal tahun menyebabkan beberapa subkegiatan harus disesuaikan kembali dengan ketersediaan dana.
3. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Masih Terbatas
Pada Triwulan I, sebagian besar kegiatan pelatihan baru berada pada tahap perencanaan dan persiapan, sehingga realisasi fisik dan output masih rendah.
4. Keterbatasan SDM Teknis dalam Pengelolaan Data Kepegawaian
Proses pemutakhiran data ASN memerlukan peningkatan kapasitas pegawai agar pengelolaan data kepegawaian lebih cepat dan akurat.

2.2.2 Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain:

1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang tertunda pada Triwulan I melalui optimalisasi proses administrasi, pelelangan, dan pelaporan keuangan.
2. Penyesuaian Jadwal dan Optimalisasi Anggaran, Menetapkan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dan melakukan efisiensi terhadap kegiatan non-prioritas agar seluruh target tetap dapat tercapai.

3. Peningkatan Kapasitas SDM, Melaksanakan pelatihan internal serta pendampingan teknis bagi staf perencana dan pengelola data ASN untuk memperkuat akurasi data dan pelaporan.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala, Melakukan evaluasi bulanan terhadap realisasi fisik dan keuangan agar kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum Triwulan II.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi kepegawaian serta digitalisasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tabalong pada Triwulan II dan Triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, sehingga target kinerja dan outcome program Tahun 2025 dapat tercapai sesuai rencana serta berkontribusi terhadap visi pembangunan daerah “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).”

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2025–2026 serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Tujuan utama BKPSDM Kabupaten Tabalong adalah “**Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)**” melalui penguatan sistem merit, peningkatan kompetensi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, BKPSDM menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Sistem Merit sebagai ukuran keberhasilan penerapan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, yang diukur melalui perolehan predikat nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut menjadi arah bagi seluruh program dan kegiatan BKPSDM dalam Perubahan Renja Tahun 2025, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kinerja aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung visi daerah “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Tabalung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan telah dilakukan perbaikan dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 meliputi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan
2. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Sasaran, Program dan Sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Nilai Indeks Kepuasan PNS Terhadap Pelayanan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
		Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		Pengelolaan Promosi ASN
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		Pengelolaan Data Kepegawaian
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
		Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Tabel 3.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)			Jenis Keg.)		Unit SKPD Penan ggung jawab	Alasan Perubah an
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebel um Peru baha n	Sesu dah Peru baha n	Seb elum Peru baha n	Sesu dah Peru baha n	Sebe lum Peru baha n	Sesuda h Peruba han	Sebelu m Perubah an	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubah an	Sebelu m Perubah an	Sesuda h Perubah an	Target Capaian Kinerja		Pa gu Ind ikat if			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12- 11	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN									Rp17.1 47.291. 484	21.697.766. 691,00	Rp4.402.4 75.207								
5	0 3				KEPEGAWAI AN									Rp13.8 23.724. 177	17.322.924. 360,00	Rp3.351.2 00.183								
5	0 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	BKP SDM Kabu pate n Tabal ong	BKP SDM Kabu pate n Tabal ong	Kab. Tab alon g		90	90	Rp9.39 2.038.5 93	10.664.593. 772,00	Rp1.272.5 55.179								
5	0 3	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan, Laporan Perencanaan dan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Tersedia Dokumen Perencanaan, Laporan Perencanaan dan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	BKP SDM Kabu pate n Tabal ong	BKP SDM Kabu pate n Tabal ong	Kab. Tab alon g		8 Doku men	8 Dokum en	Rp83.2 16.234	96.067.444, 00	Rp12.851. 210								
5	0 3	0 1	2. 0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tab alon g		2 Doku men	2 Dokum en	Rp24.96 4.560	24.964.560, 00	Rp -								
5	0 3	0 1	2. 0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tab alon g		5 Lapo ran	5 Laporan	Rp27.14 8.790	40.000.000, 00	Rp 12.851.21 0				Rp 40.000.000				

5	03	01	201	0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kab. Tabalong		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp15.978.140	15.978.140,00	Rp-					Rp15.978.140			
5	03	01	201	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Kab. Tabalong		73 Data	73 Data	Rp15.124.744	15.124.744,00	Rp-					Rp15.124.744			
5	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Gaji dan Tunjangan	Realisasi Gaji dan Tunjangan			Kab. Tabalong		80%	100%	Rp6.368.110.870	6.389.366.000,00	Rp21.255.130					Rp6.389.366.000			
5	03	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tabalong		25 Orang/bulan	27 Orang/bulan	Rp6.334.366.000	6.334.366.000,00	Rp-					Rp6.334.366.000			
5	03	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Kab. Tabalong		12 Laporan	12 Laporan	Rp33.744.870	55.000.000,00	Rp21.255.130					Rp55.000.000			
5	03	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kab. Tabalong				Rp278.602.500	418.602.500,00	Rp140.000.000					Rp418.602.500			
5	03	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kab. Tabalong		40 Paket	80 Paket	Rp68.602.500	108.602.500,00	Rp40.000.000					Rp108.602.500			Penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian batik hari jadi

5	03	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kab. Tabalong		40 Orang	45 Orang	Rp210.000.000	310.000.000,00	Rp100.000.000			305.058.000,00		Rp4.942.000			
5	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan			Kab. Tabalong		100%	100%	Rp1.072.969.232	1.639.920.328,00	Rp566.951.096					Rp1.639.920.328			
5	03	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kab. Tabalong		2 Paket	2 Paket	Rp26.174.902	26.174.902,00	Rp-					Rp26.174.902			
5	03	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kab. Tabalong		15 Paket	20 Paket	Rp772.743.904	1.100.000.000,00	Rp327.256.096			814.378.576,00		Rp285.621.424			Pengadaan peralatan pendukung untuk Zoom meeting, fasilitas aula dan kelas untuk pelatihan, serta peremajaan peralatan dan perlengkapan kantor.
5	03	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kab. Tabalong		1 Paket	1 Paket	Rp16.716.636	16.716.636,00	Rp-					Rp16.716.636			
5	03	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kab. Tabalong		1 Paket	1 Paket	Rp10.200.000	10.200.000,00	Rp-					Rp10.200.000			
5	03	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kab. Tabalong		4 Paket	5 Paket	Rp36.448.790	56.448.790,00	Rp20.000.000					Rp56.448.790			Penambahan untuk cetak kalender tahun 226
5	03	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Kab. Tabalong		1163 Dokumen	1163 Dokumen	Rp10.380.000	10.380.000,00	Rp-					Rp10.380.000			

5	03	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD			Kab. Tabalong		100 Laporan	200 Laporan	Rp200.305.000	420.000.000,00	Rp 219.695.000					Rp 420.000.000			
5	03	01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan barang Milik Daerah			Kab. Tabalong		0	3 unit	Rp0	100.000.000,00	Rp 100.000.000					Rp 100.000.000			
5	03	01	207		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Kab. Tabalong		0	3 unit	Rp0	100.000.000,00	Rp 100.000.000					Rp 100.000.000			Penggantian Sepeda Motor dinas, karena sepeda motor yang ada kondisinya sudah tidak optimal lagi
5	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Tabalong		100 %		Rp839.637.500	950.637.500,00	Rp111.000.000					Rp 950.637.500			
5	03	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tabalong		1 Laporan	1 Laporan	Rp5.000.000	6.000.000,00	Rp 1.000.000					Rp 6.000.000			
5	03	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kab. Tabalong		1 Laporan	1 Laporan	Rp118.200.000	128.200.000,00	Rp 10.000.000					Rp 128.200.000			
5	03	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Tabalong		1 Laporan	1 Laporan	Rp716.437.500	816.437.500,00	Rp 100.000.000			784.837.500,00		Rp 31.600.000			untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari jadi
5	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Tabalong				Rp749.502.257	1.070.000.000,00	Rp320.497.743					Rp 1.070.000.000			

5	03	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kab. Tabalong	20 Unit	21 Unit	Rp241.10.000	300.000.000,00	Rp 58.890.000			275.490.000,00		Rp 24.510.000			
5	03	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab. Tabalong	65 Unit	65 Unit	Rp43.370.000	70.000.000,00	Rp 26.630.000					Rp 70.000.000			perbaikan/rehabilitasi jaringan internet
5	03	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Tabalong	3 Unit	3 Unit	Rp465.022.257	700.000.000,00	Rp 234.977.743					Rp 700.000.000			Pembuatan tempat parkir, perbaikan wc aula dan perbaikan fasilitas kantor lainnya.
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)			Kab. Tabalong	100 %	100%	Rp4.431.685.584	6.658.330.588,00	Rp2.078.645.004					Rp 6.658.330.588			
5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian			Kab. Tabalong	100 %	100%	Rp955.466.267	2.446.111.271,00	Rp1.490.645.004	APBD	APBD			Rp 2.446.111.271			
5	03	02	201	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp17.102.000	25.333.000,00	Rp 8.231.000	APBD	APBD	24.283.000,00		Rp 1.050.000		BKPSDM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi rencana kebutuhan ASN tahun berjalan untuk Perangka t Daerah di Kab. Tabalong

5	03	02	201	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Mahasiswa sekolah kedinasan dengan pola pembibitan	Mahasiswa sekolah kedinasan dengan pola pembibitan	Jakarta	Jakarta	0	1 Laporan	Rp0	249.518.004,00	Rp 249.518.004	APBD	344918124,9		Rp 249.518.004	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN)	untuk Pembiayaan mahasiswa Polabibitan PKN STAN dan Polstat STIS di T.A. 2025
5	03	02	201	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	CASN yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	CASN yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Tabalong		1 Laporan	1 Laporan	Rp207.308.808	308.600.808,00	Rp 101.292.000	APBD	APBD	299.661.208,00	Rp 8.939.600	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi pelaksanaan seleksi pengadaan CASN T.A. 2025
5	03	02	201	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun sebanyak 80 orang	PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun sebanyak 80 orang	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp213.203.075	1.070.449.075,00	Rp 857.246.000	APBD	APBD	1.195.853.075,00	Rp - 125.404.000	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas T.A. 2025

5	03	02	201	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	ASN Kab. Tabalong	ASN Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan Prov. Sumatera Selatan	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp401.877.925	613.399.925,00	Rp 211.522.000	APBD	APBD			Rp 613.399.925	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengan, Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi DP KORPRI serta kontingen PORNAS dan MTQ KORPRI
5	03	02	201	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			Kab. Tabalong		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp36.373.480	78.810.480,00	Rp 42.437.000	APBD	APBD	45.208.500,00		Rp 33.601.980	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengan, Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi sinkronisasi dan penyelesaian data kepegawaian melalui layanan perencanaan SIASN BKN dengan data pada dapodik dan retribut
5	03	02	201	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Tabalong		1 Laporan	1 Laporan	Rp79.600.979	99.999.979,00	Rp 20.399.000	APBD	APBD	103.190.000,00		Rp 3.190.021	BKPS DM Kabupaten Tabalong (Bidang Pengan, Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas ASN)	fasilitasi penyelesaian disparitas data ASN dengan BKN
5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN			Kab. Tabalong		100%	100%	Rp659.279.000	1.159.279.000,00	Rp500.000.000					Rp 1.159.279.000		

5	03	02	202	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			Kab. Tabalong	15 Dokumen	21 Dokumen	Rp179.787.000	329.787.000,00	Rp150.000.000			329,787,000.06	#VALUE!			Koordinasi dengan Kemendagri dan BKN Pusat terkait proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta asistensi dan verifikasi usulan mutasi dan pemberhentian melalui aplikasi i-mut dengan BKN Pusat
5	03	02	202	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Kab. Tabalong	600 Dokumen	1000 Dokumen	Rp272.331.000	372.331.000,00	Rp100.000.000				Rp372.331.000			Asistensi dan Verifikasi 6 Periode Kenaikan Pangkat dengan BKD Provinsi dan BKN Kanreg serta BKN Pusat

5	03	02	202	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			Kab. Tabalong	4 Dokumen	6 Dokumen	Rp207.161.000	457.161.000,00	Rp 250.000.000			457,161,000.04	#VALUE!			Koordinasi Panitia Seleksi Terbuka dan Panitia Rotasi/Mutasi dengan Kemendagri dan BKN Pusat terkait proses Uji Kompetensi JPT Pratama dan Seleksi Terbuka dan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi JPT Pratama dan Seleksi Terbuka dengan 7 JPT Pratama yang lowong serta Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan Panitia Rotasi/Mutasi
5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan	Persentase Peningkatan Pendidikan			Kab. Tabalong	100%	100%	Rp2.280.110.397	2.516.110.397,00	Rp88.000.000				Rp 2.516.110.397			
5	03	02	203	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			Kab. Tabalong	56 Orang	65 orang	Rp1.073.438.897	1.235.438.897,00	Rp 162.000.000			1,234,979,900.00	#VALUE!			Pelaksanaan Asesmen untuk seluruh Pejabat Eselon II dan III
5	03	02	203	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			Kab. Tabalong	65 Orang	70 orang	Rp1.206.671.500	1.280.671.500,00	Rp - 74.000.000			1,100,923,300.00	#VALUE!			

5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kab. Tabalong		100%	100%	Rp536.829.920	536.829.920,00	Rp0						Rp536.829.920			
5	03	02	204	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kab. Tabalong		5200 Dokumen	5200 Dokumen	Rp153.735.000	153.735.000,00	Rp-						Rp153.735.000			
5	03	02	204	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			Kab. Tabalong		300 Orang	300 Orang	Rp220.635.000	220.635.000,00	Rp-						Rp220.635.000			
5	03	02	204	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			Kab. Tabalong		200 Orang	200 Orang	Rp130.322.450	130.322.450,00	Rp-						Rp130.322.450			
5	03	02	204	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Kab. Tabalong		5 Laporan	5 Laporan	Rp6.140.000	6.140.000,00	Rp-						Rp6.140.000			
5	03	02	204	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			Kab. Tabalong		5 Dokumen	5 Dokumen	Rp25.997.470	25.997.470,00	Rp-						Rp25.997.470			
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					Kab. Tabalong				Rp3.323.567.307	4.374.842.31,00	Rp1.051.275.024						Rp4.374.842.31			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai			Kab. Tabalong		100%	100%	Rp3.323.567.307	4.374.842.31,00	Rp1.051.275.024						Rp4.374.842.31			
5	04	02	201		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Lulus Diklat	Persentase ASN yang Lulus Diklat			Kab. Tabalong		50 Orang	50 Orang	Rp552.948.973	903.009.973,00	Rp350.061.000						Rp903.009.973			

5	04	02	201	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			Kab. Tabalong	70 Orang	100 Orang	Rp552.948.973	903.009.973,00	Rp350.061.000			855.821.973,00		Rp47.188.000			
5	04	02	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus	Persentase ASN yang lulus			Kab. Tabalong	217 Orang	217 Orang	Rp2.679.674.534	3.317.742.358,00	Rp638.067.824					Rp3.317.742.358			
5	04	02	202	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	3 Laporan	635 Orang	Rp2.679.674.534	3.317.742.358,00	Rp638.067.824	APBD	APBD	2.901.705.870,00		Rp416.036.488	BKPSDM Kabupaten Tabalong (Bidan g Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Adanya Perubahan tempat pelaksanaan Diklat PKN dan PKA yang semula rencana Anggaran di BPSDMD Provinsi Kalsel dialihkan ke Jawa Timur dan dan D.I Yogyakarta karena BPSDMD Provinsi Kalsel tidak Melaksanakan PKN dan terbatasnya Kouta Diklat PKA, serta perubahan Locus Studi Lapangan Peserta PKP menjadi di Banjarbaru.\

5	04	02	2.03		Kegiatan Pengembangan an Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri					Kab. Tabalong				Rp90.943.800	154.090.000,00	Rp63.146.200					Rp154.090.000			
5	04	02	2.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			Kab. Tabalong	12 Orang	12 orang		Rp90.943.800	154.090.000,00	Rp63.146.200			137.211.800,00		Rp16.878.200			
JUMLAH														Rp17.147.291.484	21.697.766.691,00	Rp4.402.475.207								

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, serta untuk memastikan keselarasan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Perubahan ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran, agar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui penyusunan dokumen ini, BKPSDM Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil (result oriented), khususnya dalam bidang pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur.

Diharapkan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan terlaksananya seluruh program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja aparatur, efisiensi birokrasi, dan pelayanan publik yang semakin baik guna mendukung pencapaian visi daerah “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).”.